



ANALISIS KESALAHAN INPUT KODE BELANJA TERHADAP AKURASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIKKA

Kristina Valen Kado¹, Andreas Rengga² Henrikus Herdi³

¹⁻³Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: kristinakado7@gmail.com

Abstract

The implementation of the Regional Government Information System (RGIS) represents a strategic initiative by the government to achieve transparency and accountability in regional financial management. However, the effectiveness of this system is highly contingent upon the quality of initial data input. This study aimed to analyze the phenomenon of expenditure code input errors at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sikka Regency and their subsequent impact on the accuracy of the Budget Realization Report (LRA). Employing a descriptive qualitative methodology, this research utilized data collection techniques including participatory observation, in-depth interviews, and document verification, conducted during an internship in the Accounting Division of BPKAD Sikka Regency. The findings reveal that misclassification between capital expenditures (CAPEX) and goods and services expenditures (OPEX) occurs frequently. This is primarily attributed to the complexity of account nomenclature and the rigid, "centrally locked" nature of the SIPD system. Consequently, these input errors lead to a distortion of information within the LRA and an overstatement of fixed assets on the Balance Sheet. This study concludes that a stringent document verification mechanism within the Accounting Division plays a pivotal role as an internal control to ensure the integrity and reliability of regional financial reports prior to their publication.

Keywords: SIPD, Expenditure Code, Report Accuracy, Budget Realization Report

Abstrak

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas input data di tingkat awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kesalahan input kode belanja yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka serta dampaknya terhadap akurasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan verifikasi dokumen selama masa magang di Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan klasifikasi antara belanja modal dan belanja barang jasa masih sering terjadi, yang disebabkan oleh kompleksitas nomenklatur akun dan karakteristik sistem SIPD yang kaku ("terkunci pusat"). Dampak dari kesalahan input ini adalah terjadinya distorsi informasi pada LRA dan posisi aset tetap di Neraca yang tersaji lebih tinggi dari nilai sebenarnya (*overstated*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme verifikasi dokumen yang ketat di Bidang Akuntansi berperan krusial sebagai pengendalian untuk menjamin integritas dan keandalan laporan keuangan daerah sebelum dipublikasikan.

Kata Kunci: SIPD, Kode Belanja, Akurasi Laporan, Laporan Realisasi Anggaran.

Pendahuluan

Pemerintah Daerah di Indonesia saat ini tengah memasuki era baru dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Sebagai platform tunggal yang mengintegrasikan proses perencanaan hingga pelaporan keuangan, SIPD menuntut ketelitian tinggi dari para penggunanya di tingkat daerah. Di Kabupaten Sikka, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi instansi sentral yang bertanggung jawab memastikan seluruh data transaksi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terinput dengan benar guna menghasilkan laporan keuangan yang valid.

Namun, dalam praktik operasional harian selama masa magang di Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sikka, ditemukan kendala serius pada tahap penatausahaan, yaitu tingginya frekuensi kesalahan penginputan kode rekening belanja oleh operator OPD. Fenomena yang paling sering muncul adalah

ketidakmampuan operator dalam membedakan klasifikasi belanja berdasarkan substansi ekonominya. Sebagai contoh, ditemukan kasus di mana biaya pemeliharaan rutin seperti servis *Air Conditioner* (AC) diinput ke dalam kode rekening Belanja Modal, yang secara aturan akuntansi seharusnya masuk ke dalam kategori Belanja Barang dan Jasa.

Kesalahan penginputan ini bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan memiliki dampak berantai terhadap kualitas laporan akhir. Ketika belanja operasional salah dikategorikan sebagai belanja modal, maka nilai aset tetap pada Neraca daerah akan tersaji lebih tinggi dari nilai sebenarnya (*overstated*). Hal ini secara otomatis mencederai keakuratan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan menghambat proses rekonsiliasi kas yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi. Jika kesalahan ini tidak dideteksi pada tahap verifikasi, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut diperparah dengan karakteristik sistem SIPD yang bersifat tersentralisasi dan memiliki tingkat kekakuan yang tinggi dalam proses revisi data yang telah terkunci. Akibatnya, operator sering kali menghadapi tekanan waktu pelaporan yang tidak sebanding dengan kemudahan pengoperasian sistem, sehingga memicu terjadinya *human error*. Tantangan teknis ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan daerah tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem aplikasi, tetapi sangat ditentukan oleh kecakapan sumber daya manusia di garda terdepan penginputan data.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah lebih dalam mengenai jenis-jenis kesalahan input kode belanja yang

terjadi di BPKAD Kabupaten Sikka serta dampaknya terhadap akurasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selain itu, kajian ini akan menguraikan langkah-langkah mitigasi dan fungsi verifikasi yang dijalankan oleh BPKAD untuk menjamin agar laporan keuangan tetap memenuhi karakteristik kualitatif andal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tinjauan Teori

Technology Acceptance Model (TAM)

Dalam penelitian ini *grand theory* yang dipergunakan adalah teori *Technology Acceptance Model (TAM)*. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Davis (1989) sebagai model untuk memprediksi dan menjelaskan penerimaan pengguna terhadap sistem teknologi informasi. TAM berargumen bahwa penerimaan pengguna ditentukan oleh dua keyakinan utama:

- 1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*):**

Sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan membebaskannya dari usaha yang berat. Dalam konteks SIPD-RI, hal ini berkaitan dengan antarmuka yang intuitif dan kemudahan operator dalam menemukan kode rekening yang tepat.

- 2. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*):**

Sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Jika operator merasa bahwa penginputan yang akurat dalam SIPD-RI sangat membantu kualitas laporan keuangan, maka kecenderungan untuk bertindak teliti akan meningkat.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD adalah pengelolaan

informasi pemerintahan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang terhubung dalam satu jaringan. SIPD-RI dirancang untuk menyatukan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan secara nasional. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kualitas input data di tingkat hulu (OPD) untuk menjamin *output* yang valid.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010, LRA harus memenuhi karakteristik kualitatif "Andal", yang berarti informasi dalam laporan tersebut harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Kasifikasi Belanja dan Kode Rekening

Klasifikasi belanja merupakan pengelompokan belanja berdasarkan ekonomi, fungsi, dan organisasi. Kode rekening belanja berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap transaksi keuangan. Kesalahan dalam pemilihan kode rekening, seperti kesalahan membedakan Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Modal, secara otomatis akan merusak struktur LRA dan menyebabkan ketidakakuratan data aset pada Neraca daerah.

Metode

Metode analisa data yang digunakan penulis dalam menganalisa masalah yang ada dengan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut (Risanaidah *et al.*, 2020) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam kesalahan input kode belanja yang terjadi pada

proses penatausahaan keuangan di BPKAD Kabupaten Sikka.

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang lebih mengutamakan proses dan makna. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kesalahan Input Kode Belanja

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan peneliti selama masa magang, ditemukan berbagai variasi kesalahan input yang dilakukan oleh operator OPD pada sistem SIPD-RI. Kesalahan yang paling dominan adalah ketidaktepatan dalam menentukan sub-rincian objek belanja. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Sikka dalam wawancara yang dilakukan peneliti:

"Kesalahan yang paling sering kami temukan saat verifikasi adalah operator OPD salah memasukkan akun belanja. Banyak yang tidak bisa membedakan mana yang masuk Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Modal. Contohnya, biaya servis AC yang sifatnya rutin malah dimasukkan ke Belanja Modal. Kalau ini dibiarkan, nilai aset di neraca kita jadi tidak karuan."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa fenomena *misklasifikasi* bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah pemahaman substansi akuntansi yang berdampak pada validitas data aset daerah.

2. Analisis Berdasarkan Teori TAM (Technology Acceptance Model)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku operator dalam menginput data sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap sistem SIPD.

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*): Operator merasa sistem SIPD-RI terlalu kaku dan memiliki nomenklatur yang sangat panjang, sehingga sulit untuk menemukan kode yang tepat dengan cepat. Bapak Kasubid Akuntansi BPKAD Kabupaten Sikka menjelaskan kendala ini dari sisi sistem:

"Sistem SIPD ini pusat yang kunci. Kalau sudah terlanjur input dan dikunci, proses untuk memperbaikinya itu memakan waktu dan birokrasi yang panjang. Akibatnya, operator di OPD kadang merasa terbebani dan kurang teliti karena sistemnya dianggap kurang user-friendly untuk perubahan data yang cepat."

2. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*): Rendahnya persepsi kegunaan terlihat dari sikap operator yang memprioritaskan "kecepatan input agar dana cair" dibandingkan "ketepatan input agar laporan akurat". Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi belum sepenuhnya dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kinerja akuntansi, melainkan hanya sebagai syarat administratif wajib.

3. Dampak terhadap Akurasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Kesalahan input tersebut membawa dampak sistemik terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Sikka:

1. Penurunan Keandalan Informasi: Kesalahan klasifikasi menyebabkan LRA memberikan informasi yang menyesatkan. Misalnya, penyerapan investasi aset terlihat tinggi (*overstated*) di Neraca, padahal kenyataannya hanyalah biaya operasional rutin.
2. Kesalahan Aritmatika dan Kas: Kesalahan tidak hanya terjadi pada kode,

tetapi juga pada nilai nominal akibat salah perhitungan pajak (PPN/PPH) atau pembulatan. Hal ini menyebabkan saldo akhir kas di LRA tidak sinkron dengan saldo kas di bank (fisik), yang berpotensi menjadi temuan material bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Upaya Mitigasi melalui Verifikasi Berjenjang

Untuk meminimalisir dampak tersebut, BPKAD Kabupaten Sikka menerapkan *Detective Control* melalui verifikasi manual yang ketat. Peneliti terlibat langsung dalam mencocokkan kode rekening pada SPJ fisik dengan struktur kode di sistem SIPD. Proses verifikasi berlapis ini berfungsi sebagai "filter" terakhir untuk menangkap kesalahan input sebelum data dikonsolidasi menjadi laporan final, sehingga akurasi LRA tetap dapat terjaga meskipun terdapat kendala penerimaan teknologi di tingkat operator.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan input kode belanja di BPKAD Kabupaten Sikka disebabkan oleh rendahnya persepsi kemudahan penggunaan sistem SIPD-RI dan pemahaman substansi akuntansi operator yang masih berorientasi administratif. Kesalahan klasifikasi ini berdampak langsung pada penurunan akurasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan potensi salah saji pada Neraca daerah. Namun, fungsi verifikasi manual yang dijalankan oleh Bidang Akuntansi terbukti efektif sebagai filter untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tersebut sebelum laporan keuangan final diterbitkan.

Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi BPKAD Kabupaten Sikka : Disarankan agar Bidang Akuntansi menyusun "Kamus Saku Kode Akun" sebagai panduan praktis bagi operator OPD. Mengingat kendala *perceived ease of use* pada SIPD-RI, penguatan edukasi mengenai perbedaan substansi belanja operasional dan belanja modal sangat diperlukan untuk meminimalisir kesalahan klasifikasi sejak tahap input awal demi menjaga akurasi LRA.
2. Bagi Universitas Nusa Nipa (Program Studi Akuntansi) : Universitas perlu mengintegrasikan simulasi penggunaan sistem informasi pemerintahan (seperti SIPD) ke dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik atau Laboratorium Akuntansi. Hal ini penting untuk meningkatkan literasi digital dan kesiapan teknis mahasiswa dalam menghadapi sistem penatausahaan keuangan daerah yang bersifat *rigid* di lapangan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya : Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif untuk menguji faktor lain yang memengaruhi efektivitas penggunaan teknologi, seperti beban kerja atau kompetensi SDM, serta memperluas lokus penelitian pada instansi pemerintah daerah lainnya.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Lestari, D. (2020). Kelemahan Pengendalian Internal dan Kontribusinya terhadap Kesalahan Input Belanja. *Jurnal Riset Akuntansi Pemerintah*, 5(2), 112-125.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gita, P., & Sinurat, M. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Di Kota Denpasar (Doctoral dissertation, IPDN).
- Gunawan, R., & Cahyo, A. (2021). Human Error dalam Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 45-58.
- Hidayat, A., & Nuraini, S. (2021). Pengaruh Ketepatan Pengkodean Akun terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 12(3), 201-215.
- Hildagard, H., Irianto, G., & Rosidi, R. (2023). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Pengaruh latar belakang pendidikan, penguasaan IT, dan sistem informasi akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2).
- Jogiyanto, H. M. (2007). *Sistem informasi keperilakuan*. Andi Offset.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan evaluasi akurasi laporan keuangan pemerintah daerah. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pradana, R., & Setyowati, L. (2021). Asimetri informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 4(1).
- Pratama, A. S. (2021). Efektivitas verifikasi dokumen sumber dalam menekan angka human error pada aplikasi SIPD. *Jurnal Keuangan Publik*, 7(2).
- Putra, I. G. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1250-1275.
- Putri, A., & Yuliani, S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kesalahan Input Data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1), 30-42.
- Ramadhan, F., et al. (2023). Literasi digital dan pemahaman substansi akuntansi pemerintahan terhadap keandalan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). *Jurnal Akuntansi Modern*, 9(1).
- Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.
- Sekaran, U. (2003). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sari, M., & Wahyudi, T. (2022). Implikasi Kesalahan Klasifikasi Belanja Modal dan Belanja Barang terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Journal of Accounting and Finance*, 7(2), 88-102.

- Setiawan, B., & Fitriani, R. (2022). Lingkungan Kerja dan Minimnya Pengawasan Internal terhadap Terjadinya Human Error. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 15-28.
- Suherwin, S. F. S. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Fakultas Sosial Sains).
- Sari, N., & Wahyudi, T. (2022). Implikasi kesalahan klasifikasi belanja modal dan belanja barang terhadap integritas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 11(1).
- Universitas Nusa Nipa. (2024). Buku pedoman magang MBKM. Maumere: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Wardaningsih, R., et al. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesalahan Input Data Pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 210-222.